MANFAAT DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM) EKS PNPM MANDIRI PERDESAAN UPK BKAD SEJAHTERA MANDIRI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022

Bayanah[1], Dyah Kusumawati[2]

Administrasi Niaga, Universitas Sultan Fatah Demak

Abstrak

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan kelanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang berakhir pada tahun 2014. Program ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat perdesaan secara terpadu dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui manfaat DAPM eks PNPM Mandiri Perdesaan bagi masyarakat; dan (2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelestarian dana bergulir DAPM.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research). Lokasi penelitian berada di Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bergulir DAPM merupakan dana hibah dari APBN yang digulirkan kepada masyarakat, khususnya melalui program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Dana ini ditujukan untuk membantu kelompok perempuan yang kesulitan mengakses pinjaman dari lembaga keuangan formal seperti bank. Program ini terbukti memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mendukung kegiatan ekonomi produktif. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pengembalian dana dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan dana.

Kata Kunci: Manfaat, DAPM, Kesejahteraan.

Abstract

The Community Empowerment Trust Fund (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat or DAPM) is a continuation of the National Program for Community Empowerment in Rural Areas (PNPM-MPd), which ended in 2014. This program aimed to alleviate poverty and empower rural communities in an integrated and sustainable manner. The objectives of this study are: (1) to identify the benefits of DAPM from the former PNPM Mandiri Perdesaan for the community, and (2) to explore the supporting and inhibiting factors in preserving the revolving fund system under DAPM.

This research employs a qualitative field research method conducted in Mayong Sub-district, Jepara Regency. Data were collected through observation, interviews, and documentation.

The findings show that the DAPM revolving fund is a government grant (sourced from the national budget) allocated to the community, particularly through the Women's Group Savings and Loan (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan or SPP) program. This fund supports women who face difficulties accessing formal bank loans. The program has had a positive impact on improving community welfare by supporting productive economic activities. However, several challenges remain, including delays in repayments and a lack of public understanding regarding fund management.

Keywords*: Benefits, DAPM, Welfare.*

A. Pendahuluan

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) merupakan kelanjutan kegiatan khusus pengelolaan pinjaman dana bergulir setelah kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) berakhir pada tahun 2014. PNPM-MPd yang dirancang sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat perdesaan secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam model pengembangan dan keberlanjutan UPK DAPM, Modal sosial berperan sebagai mediasi pengaruh tata kelola, kualitas manajemen, legal dan struktural, dan jangkauan pasar terhadap pengembangan dan keberlanjutan UPK DAPM. Model pengembangan dan

keberlanjutan DAPM mensyaratkan tata kelola yang baik, peningkatan kapasitas *(capacity building)* untuk menjamin kualitas manajemen, legalitas bentuk kelembagaan agar pengelolaan DAPM tetap berlanjut menjadi lembaga keuangan mikro yang professional dan sehat. Namun terkadang model pinjaman berbasis kelompok ini masih ditemukan beberapa kendala yang terjadi di masyarakat, diantaranya ditemukan beberapa pengurus atau ketua kelompok yang tidak amanah. Hal seperti ini bisa menghambat dalam kelancaran Dana Bergulir DAPM. DAPM akan dikembangkan menjadi lembaga yang mampu mensenyawakan pemberdayaan masyarakat miskin dan profesionalisme - kesinambungan keuangan. Kelembagaan UPK DAPM menjadi profesional tanpa meninggalkan pelayanannya kepada masyarakat miskin.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)

DAPM adalah pengelolaan dana bergulir pasca berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) tahun 2014, yang dilanjutkan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan. DAPM merupakan instrumen keberlanjutan pemberdayaan masyarakat berbasis aset dana simpan pinjam (terutama untuk perempuan) dan usaha produktif masyarakat miskin.

Menurut Kementerian Desa PDTT (2020), DAPM bertujuan untuk melanjutkan manfaat PNPM dengan prinsip tata kelola yang baik, inklusi keuangan, dan kemandirian kelembagaan desa.

"DAPM hadir untuk memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat desa dan melanjutkan semangat pemberdayaan

yang telah dibangun oleh PNPM-MPd." (Kemendesa PDTT, 2020)

2. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

Program SPP adalah bagian dari DAPM yang ditujukan untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada perempuan pelaku usaha mikro. Program ini membantu pemberdayaan ekonomi rumah tangga dan menjadi sarana penguatan ekonomi berbasis kelompok.

Menurut Indriani et al. (2020), program SPP berperan penting dalam memperluas akses keuangan di tingkat akar rumput (grassroots finance) karena menjangkau mereka yang tidak terlayani oleh sistem keuangan formal.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Bappenas (2022), kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator ekonomi (pendapatan, pengeluaran, produktivitas), sosial (akses pendidikan, kesehatan), dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sejalan dengan teori Maslow, kesejahteraan dapat dicapai ketika kebutuhan dasar manusia terpenuhi dan didukung oleh pemberdayaan sosial serta ekonomi (Maslow, 1943).

4. Model Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses sumber daya dan menentukan arah pembangunan mereka sendiri (Chambers, 1995). Pemberdayaan berbasis dana bergulir seperti DAPM dikembangkan dengan prinsip partisipasi, transparansi, dan kemandirian ekonomi lokal (Nugroho, 2022).

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan (field research). Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam manfaat, proses, serta kendala dalam implementasi DAPM di Kecamatan Mayong.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pengumpulan data berlangsung selama periode Maret–April 2023.

3. Sumber Data

a. **Data Primer**: Diperoleh melalui wawancara mendalam dengan:
    a. Sekretaris BKAD
    b. Ketua dan Sekretaris UPK
    c. Kader SPP Desa
    d. Ketua dan Anggota Kelompok SPP

b. **Data Sekunder**: Dokumen laporan kegiatan UPK, AD/ART BKAD, laporan keuangan SPP, dan dokumen DAPM.

4. Teknik Pengumpulan Data

- **Wawancara**: Digunakan untuk menggali persepsi dan pengalaman pengelola dan penerima manfaat.
- **Observasi**: Mengamati proses kegiatan SPP di lapangan.
- **Dokumentasi**: Mengkaji arsip, laporan, dan dokumentasi kegiatan DAPM.

5. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman (1994):

1. **Reduksi data**: Menyaring informasi penting dari hasil wawancara dan dokumentasi.
2. **Penyajian data**: Mengorganisir data ke dalam tabel, narasi, dan matriks.
3. **Penarikan kesimpulan**: Menyusun interpretasi berdasarkan temuan lapangan.

D. Pembahasan

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) eks PNPM Mandiri Perdesaan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Mayong. Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) sebagai bagian utama dari DAPM menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi, terutama bagi kelompok perempuan yang secara historis mengalami keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris BKAD, Ketua UPK, Sekretaris UPK, Staf UPK, Kader SPP Desa, dan Ketua Kelompok SPP, diketahui bahwa peningkatan aset dana bergulir dan jumlah anggota penerima manfaat menjadi indikator keberhasilan program. Selain itu, dana ini telah membantu banyak usaha mikro dalam meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar mereka. Namun, masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan, di antaranya adalah keterlambatan pengembalian pinjaman, rendahnya literasi keuangan, serta lemahnya pengawasan internal kelompok. Temuan ini sejalan dengan penelitian Indriani et al. (2020) yang

menyatakan bahwa keberhasilan dana bergulir memerlukan sinergi antara manajemen kelembagaan, tata kelola yang transparan, dan partisipasi aktif masyarakat.

Secara sosial, DAPM juga membangun modal sosial masyarakat, terutama dalam bentuk gotong royong dan solidaritas antar anggota kelompok. Hal ini sesuai dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (community-driven development) yang menekankan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dana publik (Chambers, 1995).

Penguatan kelembagaan seperti peningkatan kapasitas pengelola UPK melalui pelatihan manajemen keuangan, penguatan sistem pelaporan, serta digitalisasi pencatatan pinjaman perlu diupayakan agar keberlanjutan program terjaga. Digitalisasi juga menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi pengelolaan dana (Mulyani, 2021).

Dengan demikian, manfaat DAPM tidak hanya dirasakan dalam bentuk peningkatan pendapatan, tetapi juga dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan perempuan, serta penguatan kohesi sosial dalam masyarakat.

Gambar 1 Kantor UPK BKAD Kecamatan Mayong

C. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) eks PNPM Mandiri Perdesaan melalui program SPP di Kecamatan Mayong memberikan manfaat yang cukup signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari kenaikan aset dana bergulir, peningkatan jumlah anggota penerima manfaat, serta tumbuhnya usaha-usaha mikro di kalangan perempuan.

Program ini juga berkontribusi dalam pembangunan sosial dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat modal sosial antar kelompok. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan seperti keterlambatan pengembalian pinjaman dan kurangnya literasi keuangan, yang perlu ditangani secara strategis.

2.Saran:

1. Peningkatan Sosialisasi: Pemerintah desa dan pengelola DAPM diharapkan memperluas sosialisasi program ke desa-desa yang belum mengakses dana bergulir.
2. Pelatihan Manajemen dan Literasi Keuangan: Diperlukan pelatihan intensif kepada anggota kelompok tentang pengelolaan keuangan usaha dan manajemen pinjaman.
3. Penguatan Sistem Monitoring: Perlu adanya sistem monitoring dan evaluasi yang lebih ketat serta

penggunaan teknologi digital untuk mencatat dan melacak transaksi dana bergulir secara transparan.

4. Kebijakan Inovatif: Pengelola DAPM disarankan membuat kebijakan baru yang mendukung kemandirian kelompok, seperti pemberian insentif bagi kelompok yang memiliki tingkat pengembalian pinjaman yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan BKAD Sejahtera Mandiri. 2021. Mayong.

Chambers, R. (1995). *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?* IDS Discussion Paper.

Indriani, Etty, Hartawan, Hartawan & Wulandari, Asri. (2020). Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat: Inklusi Keuangan dengan Pendekatan Ekonomi Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 21(2), 145-160.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Pedoman Umum Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)*.

Mulyani, S. (2021). Transformasi Digital dalam Pengelolaan Dana Bergulir: Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 30-45.

Nugroho, R. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

World Bank. (2018). *Community-Driven Development Toolkit*. Washington, D.C.: World Bank Group.